

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi semakin menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia bisnis dan sosial, terutama teknologi informasi digunakan bukan hanya sebagai pendukung tetapi juga sebagai kebutuhan utama yang dapat digunakan untuk menyediakan informasi dengan cepat. Kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrogram komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas, guna membantu meringankan Kinerja Manusia pada umumnya, maka dikembangkanlah suatu teknologi yang sangat cerdas. Perkembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support Sistem (DSS) pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah Management Decision System, Sistem tersebut adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur (Wibowo & Thyo Priandika, 2021)

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanisa Tanjung dkk pada tahun 2022. Dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Data Penduduk Yang Mendapatkan Kegiatan Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Dengan Metode Additive Ratio Assessment Pada Unit Pemukiman Transmigrasi. Pada penelitian ini menjelaskan upaya mengentaskan kemiskinan

dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan berbagai program. Salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan, melalui akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan/e-warung yang telah bekerjasama dengan Bank HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara). Dari analisa maka diperoleh gambaran bahwa sistem pendukung keputusan yang mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) pada unit pemukiman transmigrasi dapat dilakukan dengan menerapkan metode additive ratio assessment dan menggunakan aplikasi pemrograman web yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga pengguna lebih mudah memperoleh hasil yang terbaik (Tanjung & Halim, 2020).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cantri Rahmi Azizah dkk pada tahun 2022. Dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai Menerapkan Metode Simple Additive Weighting (SAW). Penelitian ini menjelaskan upaya dalam menentukan penerimaan bantuan pangan Non Tunai selama ini masih menggunakan secara konvensional. Hal ini membuat kurang optimalnya dalam menentukan siapa saja masyarakatnya yang memenuhi dalam pemilihan penerimaan bantuan pangan ini, terutama yang prioritas dari beberapa orang yang sudah terdaftar namanya di Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara. Dalam melakukan perhitungan pemilihan ini tidak menggunakan kriteria yang spesifik sehingga alternatif yang didapatkan

tidak sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu membutuhkan waktu yang tidak cepat dalam menentukan keputusan dan lambatnya hasil yang diperoleh karena harus dilakukan dengan cara mengadakan rapat antara pegawai dan kepala dinas yang menyebabkan hasil keputusannya menjadi tidak tepat sasaran. Maka Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara membutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan untuk memberikan pilihan alternatif dan mempermudah dalam menentukan calon peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menentukan penilaian keputusan untuk Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai. Metode yang dilakukan yaitu dengan pengumpulan data pengisian formulir yang diberikan kepada masyarakat desa dan menggunakan implementasi metode Simple Additive Weighted(SAW) sebagai sistem pendukung keputusan dalam penerimaan bantuan pangan non tunai pada Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara (Fikri et al., 2022).

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebuah instansi pemerintah daerah yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayahnya. Fokus utama dinas ini adalah menangani berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, serta bantuan kepada penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, dinas ini juga bertugas memberikan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan darurat bagi masyarakat terdampak bencana. Dalam upayanya memberdayakan masyarakat, Dinas ini juga menangani isu sosial lainnya, seperti anak jalanan, tuna wisma, dan korban kekerasan, dengan pendekatan yang terintegrasi. Melalui pengelolaan data dan informasi yang akurat,

Dinas Sosial merancang kebijakan yang efektif dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini dilakukan pada sebuah kantor Dinas Sosial dimana terjadi masalah dalam penanganan penerimaan bantuan pangan bersubsidi pada Dinas Sosial sering kali terkait dengan validasi data penerima, distribusi yang tidak merata, dan kurangnya transparansi dalam proses pendataan. Data penerima bantuan sering kali tidak diperbarui secara berkala, sehingga masih terdapat penerima yang tidak memenuhi kriteria atau adanya masyarakat yang membutuhkan namun tidak terdata. Selain itu, mekanisme distribusi bantuan terkadang menghadapi kendala teknis, seperti keterlambatan penyaluran akibat faktor logistik atau minimnya koordinasi antara pihak terkait. Masalah transparansi juga menjadi tantangan, karena kurangnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan, seperti penyelewengan bantuan atau tidak tepat sasaran. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan memengaruhi kredibilitas program bantuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan akurasi data, penguatan koordinasi, serta penerapan sistem pengawasan yang lebih baik untuk memastikan bantuan pangan bersubsidi dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka penelitian ini mengusulkan perhitungan pendukung keputusan dengan metode Metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Metode ini kembangkan awal tahun 1970-an oleh Dr. Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg. AHP pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan

sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi di antara berbagai set alternative. Analisis ini tunjukkan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai struktur, biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah yang terukur, masalah yang memerlukan pendapat maupun pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka, pada situasi dimana data statistika sangat minim atau tidak ada sama sekali dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman ataupun intuisi. Sistem Pendukung Keputusan bertujuan untuk menyediakan informasi, bimbingan, memberikan prediksi serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik.(Saaty, 2008).

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengangkat judul penelitian yaitu **“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN BAHAN PANGAN BERSUBSIDI UNTUK KELUARGA KURANG MAMPU DENGAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) PADA DINAS SOAIL KAB. LIMA PULUH KOTA”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penelitian yang dilakukan dapat membantu Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyalurkan bahan pangan bersubsidi yang tepat sasaran?

2. Bagaimana penelitian yang dilakukan dapat membantu Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyalurkan bahan pangan bersubsidi agar lebih objektif?
3. Bagaimana penelitian yang dilakukan dapat membantu Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan bahan pangan bersubsidi?

1.3 Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan sementara atau pemecahan masalah yang bersifat sementara yang nantinya akan dibuktikan dengan hasil yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Ada beberapa hipotesis yang dapat dijabarkan, antara lain yaitu:

1. Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat membantu Dinas Sosial dalam menyalurkan bahan pangan bersubsidi yang tepat sasaran.
2. Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat membantu Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyalurkan bahan pangan bersubsidi agar lebih objektif.
3. Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat membantu Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan bahan pangan bersubsidi.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada pengembangan sistem pendukung keputusan untuk menentukan penerima bantuan pangan bersubsidi di

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Kasus yang diangkat adalah permasalahan validasi data penerima, distribusi bantuan yang tidak merata, dan kurang tepat sasaran dalam proses penentuan penerima. Penelitian ini menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) sebagai pendekatan utama dalam pengambilan keputusan. Objek penelitian adalah keluarga kurang mampu yang terdaftar sebagai calon penerima bantuan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini memanfaatkan dataset berupa data penerima bantuan yang sudah ada di Dinas Sosial, termasuk data demografis, ekonomi, dan sosial penerima. Sistem ini akan dikembangkan menggunakan basis aplikasi berbasis web dengan pemrograman PHP, yang dirancang untuk mempermudah proses pengambilan keputusan secara efektif dan transparan.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Membantu Dinas Sosial dalam menyalurkan bahan pangan bersubsidi yang tepat sasaran.
2. Membantu Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyalurkan bahan pangan bersubsidi agar lebih objektif.
3. Membantu Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan bahan pangan bersubsidi

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyaluran bantuan pangan bersubsidi agar tepat sasaran
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pengambilan keputusan.
3. Menjamin keterpaduan dan validitas data penerima bantuan.

1.7 Gambaran Umum objek Penelitian

1.7.1 Sekilas Tentang Dinasl Sosial.

Dinas Sosial merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang social. Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota awalnya merupakan bagian dari departemen social RI tingkat wilayah Kabupaten/Kota yang kemudian dibubarkan oleh presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Pasca pembubaran tersebut, kemudian muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan sebagainya, maka pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota segera menggagas dan membentuk suatu instasnsi urusan pemerintahan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dengan kepala kantor pertama pada tahun 2002 yang diberi nama Kantor Sosial dengan kepala kantor pertama yaitu Yanuar Abdullah. Kemudian pada tahun 2008 seiring dengan meluasnya tugas pokok dan fungsi, maka Kantor Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berubah menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan dikepalai oleh seorang kepala dinas, hingga tahun 2017 Dinas Sosial menjadi sendiri berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan perturan

Bupati Lima Puluh Kota nomor 53 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial.

- a. Jumlah Kecamatan : 13 Kecamatan
- b. Jumlah Nagari : 79 Nagari

Letak geografis Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

- a. Luas wilayah : 3.571,14Km²
- b. Batas Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagi berikut :
 - i. Utara : Kampar, Riau.
 - ii. Barat : Agam dan Pasaman.
 - iii. Selatan : Tanah Datar, Sijunjung.
 - iv. Timur : Kampar, Riau.

1.7.2 Visi dan Misi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Sosial menyusun visi dan misi yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan. Berikut ini disajikan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai dasar arah dan tujuan dalam menjalankan tugasnya.

1. Visi

“Mewujudkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Bermatabat”.

Merujuk kepada visi tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) adlah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan,

kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

- b) Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung kepada orang lain. PPKS mandiri adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar tanpa tergantung kepada orang lain.
- c) Bermatabat adalah seseorang yang memiliki kehormatan, kemuliaan, gengsi, marwah, kewibawaan dan nama baik yang setara dan sederajat dengan orang lain dan lingkungannya.

2. Misi

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui berbagai program yang terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dinas Sosial memiliki misi yang jelas dan terarah. Berikut ini adalah misi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pedoman dalam upaya mencapai tujuan tersebut.

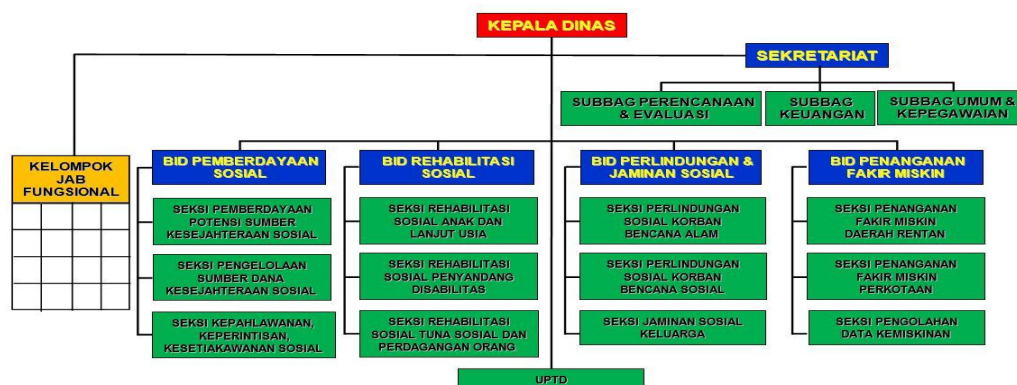
1.7.1 Meningkatkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial(PPKS).

1.7.2 Meningkatkan propesionalisme potensi sumber kesejahteraan sosial (PPKS) dalamakurasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)dan pemenuhan kebutuhan dasapemebrdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial gabi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

1.7.3 Membangun kepedulian sosial seseorang, keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitassosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

1.7.3 Struktur Kantor Dinas Sosial

Dengan adanya struktur ini diharapkan akan dapat diketahui dengan jelas mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab di Kantor Dinas Sosial. Adapun struktur Kantor Dinas Sosial dapat di lihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :



Sumber : Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota

Gambar 1. 1 Struktur Dinas Sosial

1.7.4 Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut adalah uraian Tugas pada Kantor Dinas Sosial:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas:

- a) Menyusun dan mengembangkan kebijakan sosial.
- b) Memastikan semua program berjalan sesuai rencana dan efektif
- c) Berkolaborasi dengan instansi lain dan pihak terkait.
- d) Menyusun laporan tahunan dan berkala mengenai kegiatan dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas:

- a) Mengelola administrasi dan dokumentasi dinas.
- b) Mengatur komunikasi antar bidang dan staf.
- c) Membantu dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki tugas:

- a) Merencanakan dan melaksanakan program.
- b) Menyediakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
- c) Mengawasi pelaksanaan dan evaluasi dampak.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki tugas:

- a) Merencanakan dan melaksanakan program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, anak jalanan, dan penyalahgunaan narkoba.
- b) Memberikan dukungan dan pendampingan kepada individu dalam proses rehabilitasi.

- c) Berkolaborasi dengan lembaga lain dalam penanganan rehabilitasi.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki tugas:

- a) Menyediakan layanan perlindungan bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan anak.
- b) Mengelola program jaminan sosial bagi masyarakat miskin.
- c) Mengadvokasi hak-hak sosial masyarakat yang tertindas.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin memiliki tugas:

- a) Mengidentifikasi dan mendata masyarakat yang tergolong fakir miskin.
- b) Merencanakan dan melaksanakan program bantuan langsung ke[ada fakir miskin.
- c) Mengawasi dan mengevaluasi dampak program terhadap pemberantasan kemiskinan.